

**PENGARUH KONEKSI POLITIK TERHADAP BIAYA HUTANG
(STUDI EMPIRIS PADA PERUSAHAAN PERTAMBANGAN YANG
TERDAFTAR DI BURSA EFEK INDONESIA TAHUN 2015-2019)**

(Skripsi)

Oleh

SANDY ADE SAPUTRA



**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2021**

ABSTRAK

PENGARUH KONEKSI POLITIK TERHADAP BIAYA HUTANG (STUDI EMPIRIS PADA PERUSAHAAN PERTAMBANGAN YANG TERDAFTAR DI BURSA EFEK INDONESIA TAHUN 2015-2019)

Oleh

SANDY ADE SAPUTRA

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh koneksi politik terhadap biaya hutang. Penelitian ini dilakukan terhadap perusahaan pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia yang berjumlah 195 sampel dengan periode pengamatan tahun 2015-2019. Metode penentuan sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode *purposive sampling*, penggunaan kriteria dalam pemilihan sampel yaitu perusahaan pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia yang secara konsisten melaporkan laporan keuangan tahunan pada tahun 2015 sampai dengan tahun 2019 dan memiliki keseluruhan data yang diperlukan oleh peneliti. Data yang digunakan adalah data sekunder. Analisis data pada penelitian ini dilakukan dengan uji regresi linear berganda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kepemilikan perusahaan terkoneksi politik dan dewan direksi terkoneksi politik berpengaruh negatif signifikan terhadap biaya hutang. Ini mengindikasikan bahwa semakin tingginya kepemilikan perusahaan terkoneksi politik dan dewan direksi terkoneksi politik, maka semakin rendah biaya hutang perusahaan.

Kata kunci : Kepemilikan Perusahaan Terkoneksi Politik, Dewan Direksi Terkoneksi Politik, Biaya Hutang.

ABSTRACT

THE EFFECT OF POLITICAL CONNECTIONS ON COST OF DEBT (STUDY ON MINING COMPANIES LISTED IN THE INDONESIAN STOCK EXCHANGE FOR 2015-2019)

By

SANDY ADE SAPUTRA

This study aims to determine the effect of political connections on the cost of debt. This research was conducted on mining companies listed on the Indonesia Stock Exchange, totaling 195 samples with an observation period of 2015-2019. The sampling method used in this study is the purposive sampling method, the use of criteria in selecting the sample, namely mining companies listed in the Indonesia Stock Exchange that consistently report annual financial statements from 2015 to 2019 and have all the data needed by researchers. The data used is secondary data. Data analysis in this study was conducted with multiple linear regression tests. The results showed that the ownership of politically connected firms and politically connected board of directors had a significant negative effect on the cost of debt. This indicates that the higher the ownership of the politically connected firms and the politically connected board of directors, the lower the company's cost of debt.

Keywords: Politically Connected Firms, Politically Connected Directors, Cost Of Debt.

**PENGARUH KONEKSI POLITIK TERHADAP BIAYA HUTANG
(STUDI EMPIRIS PADA PERUSAHAAN PERTAMBANGAN YANG
TERDAFTAR DI BURSA EFEK INDONESIA TAHUN 2015-2019)**

Oleh

SANDY ADE SAPUTRA

Skripsi

**Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Mencapai Gelar
SARJANA AKUNTANSI**

Pada

**Jurusan Akuntansi
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung**



**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2021**

Judul Skripsi

**PENGARUH KONEKSI POLITIK
TERHADAP BIAYA HUTANG (Studi
Empiris Pada Perusahaan Pertambangan
Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia
Tahun 2015-2019)**

Nama Mahasiswa : **Sandy Ade Saputra**

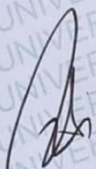
Nomor Pokok Mahasiswa : 1711031074

Jurusan : Akuntansi


Fakultas : Ekonomi dan Bisnis



MENYETUJUI
1. **Komisi Pembimbing**



Susi Sarumpaet, S.E., M.B.A., Ph.D., Ak., CA

NIP. 196910081995012001


Niken Kusumawardani, S.E., M.Sc., Ak., CA

NIP. 198701102014042001

2. **Ketua Jurusan Akuntansi**

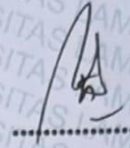

Prof. Dr. Lindrianasari, S.E., M.Si., Ak., CA.

NIP. 19700871997032002

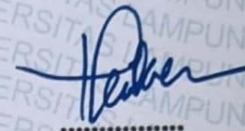
MENGESAHKAN

1. Tim Penguji

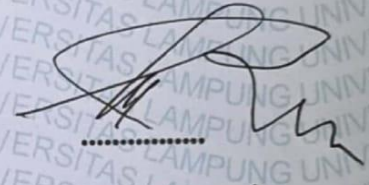
Ketua : Susi Sarumpaet, S.E., M.B.A., Ph.D., Ak., CA



Sekretaris : Niken Kusumawardani, S.E., M.Sc., Ak., CA.



Penguji Utama : Prof. Dr. Nurdiono, SE, MM, Ak., CA., CPA.



2. Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis



Dr. Nairabi, S.E., M.Si.

NIP. 196606211990031003

Tanggal Lulus Ujian Skripsi: 17 November 2021

PERNYATAAN BEBAS PLAGIARISME

Saya yang bertandatangan dibawah ini:

Nama : Sandy Ade Saputra

NPM : 1711031074

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi yang berjudul “PENGARUH KONEKSI POLITIK TERHADAP BIAYA HUTANG (Studi Empiris Pada Perusahaan Pertambangan Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Tahun 2015-2019)” telah ditulis secara sungguh-sungguh dan merupakan hasil karya sendiri, dan saya tidak melakukan plagiarisme atau pengutipan atas karya orang lain dengan cara yang tidak sesuai dengan tata etika ilmiah yang berlaku dalam masyarakat akademik. Apabila dikemudian hari terbukti bahwa pernyataan ini tidak benar, maka saya sanggup menerima sanksi sesuai peraturan yang berlaku.

Bandar Lampung, 17 November 2021


Sandy Ade Saputra

RIWAYAT HIDUP



Penulis dilahirkan di Bandar Lampung pada tanggal 07 Juni 1999 sebagai anak pertama dari Bapak Armizi dan Ibu Masnun. Penulis mengawali pendidikan taman kanak-kanak di TK Asuhan Bunda Bandar Lampung dan diselesaikan pada

Tahun 2005, sekolah dasar di SD Negeri 1 Sukabumi Indah Bandar Lampung yang diselesaikan pada tahun 2011, sekolah menengah pertama di SMP Negeri 5 Bandar Lampung yang diselesaikan pada tahun 2014, dan menyelesaikan sekolah menengah atas di SMA Negeri 5 Bandar Lampung pada tahun 2017. Selain itu penulis juga mengikuti kursus Bahasa Inggris di *Standard Gandhi English Language Centre* Bandar Lampung dari tahun 2008-2015.

Pada tahun 2017 Penulis diterima sebagai mahasiswa Program Studi S1 Akuntansi di Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung melalui jalur SBMPTN. Selama di bangku kuliah, Penulis aktif dalam beberapa organisasi diantaranya sebagai anggota Himpunan Mahasiswa Akuntansi (Himakta) sebagai Anggota Bidang Humas periode 2018/2019, penulis juga ikut sebagai anggota Unit Kegiatan Mahasiswa Kelompok Studi Pasar Modal periode 2018/2019.

MOTTO

“Tidak penting apa agama dan sukumu, kalau kamu bisa melakukan sesuatu yang baik untuk semua manusia, maka orang tidak pernah tanya apa agamamu.”

Abdurrahman Wahid

“Talk less, Do more.”

Sandy Ade Saputra

“Maka nikmat Tuhanmu yang manakah yang kau dustakan?.”

(Q.S. Ar-Rahman)

PERSEMBAHAN

Alhamdulillahirobbilalamin

Puji syukur kepada Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan karunia-Nya sehingga dapat terselesaikannya penulisan skripsi ini. Shalawat beriring salam selalu disanjung agungkan kepada Nabi Muhammad SAW.

Kupersembahkan skripsi ini sebagai tanda cinta dan kasih sayang yang tulus kepada:

Kedua orang tuaku tercinta, Ayahanda Armizi dan Ibunda Masnun yang telah memberikan seluruh cinta dan kasih sayang, dukungan, dan doa yang tiada henti untuk kesuksesanku. Terima kasih yang tiada tara kepada ibu dan ayah karena telah merawat, membesarkan, dan mendidiknya tanpa lelah.

Seluruh keluarga, sahabat, dan teman-temanku yang selalu memberikan semangat, doa, dan dukungan tiada henti

Almamaterku tercinta, Universitas Lampung

SANWACANA

Alhamdulillah, segala puji dan syukur kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul “Pengaruh Koneksi Politik Terhadap Biaya Hutang (Studi Empiris Pada Perusahaan Pertambangan Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Tahun 2015-2019) sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Akuntansi pada Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung.

Pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih yang tulus kepada semua pihak yang telah memberikan bimbingan, dukungan, dan bantuan selama proses penyusunan dan penyelesaian skripsi ini. Secara khusus, penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Dr. Nairobi, S.E., M.Si. selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung.
2. Ibu Prof. Dr. Lindrianasari, S.E., M. Si., Akt. CA. selaku Ketua Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung.
3. Ibu Dr. Reni Oktavia, S.E., M.Si., Akt. selaku Sekretaris Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung.

4. Ibu Susi Sarumpaet, S.E., M.B.A., Ph.D., Ak., CA. selaku Dosen Pembimbing Utama atas waktu, bimbingan, saran, nasihat, dan pengalaman yang telah diberikan selama proses penyelesaian skripsi ini.
5. Ibu Niken Kusumawardani, S.E., M.Sc., Ak., CA. selaku Dosen Pembimbing Kedua atas waktu, bimbingan, saran, dan nasihat yang telah diberikan dengan penuh kesabaran selama proses penyelesaian skripsi ini.
6. Bapak Prof. Dr. Nurdiono, SE, MM, Ak., CA., CPA. selaku Dosen Penguji Utama yang telah memberikan masukan, nasihat, saran-saran yang membangun serta diskusi yang bermanfaat mengenai pengetahuan untuk penyempurnaan skripsi ini.
7. Ibu Dewi Sukmasari, S.E., M.S.A., Ak., CA. selaku Dosen Pembimbing Akademik atas waktu, bimbingan, saran, dan nasihat yang telah diberikan dengan penuh kesabaran selama proses perkuliahan berlangsung.
8. Seluruh Bapak/Ibu Dosen di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung yang telah memberikan ilmu dan pengetahuannya, serta pembelajaran selama proses perkuliahan berlangsung.
9. Seluruh staf akademik, administrasi, tata usaha, para pegawai, serta staf keamanan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung.
10. Orang tuaku, Bapak Armizi dan Ibu Masnun, terima kasih atas semua jerih payah selama membesarkan saya, selalu merawat, mencintai, mengiringi langkah saya dengan doa tanpa henti. Kasih sayang dan ucapan terima kasih selalu saya berikan untuk kalian.
11. Adik-adikku, Muhammad Ghozy Aimar Akbar dan Nazwa Amelya Shofiana,

terima kasih atas telah memberikan kasih sayang, selalu memberikan semangat, perhatian, dukungan, dan doa, yang sangat luar biasa kepada penulis.

12. Aderia Putri, terimakasih karena telah memberikan dukungan, bantuan dan doanya serta waktunya sehingga terselesaikannya skripsi ini, semoga apa yang kita cita-citakan dapat tercapai dan bisa menuju kesuksesan bersama.
13. Teman-teman kontrakan asw Andre, Jordan, Rafi, Taufik, Husain, Arif, Deddy, Avif, Samuel, Anton, Bangkit, Afif yang telah berjuang bersama, gabut bersama, pusing bersama selama proses perkuliahan ini. Terimakasih atas kenangan dan pembelajaran hidup yang berharga.
14. Evita, Findy, Fahmi, Siska, Mardhi, dan Lovia. Terima kasih selama ini telah menjadi orang baik yang memberi semangat, mengingatkan, dan membantu selama masa perkuliahan ini.
15. Teman-teman KKN Desa Purwajaya, Ade, Arum, Gito, Nisa, Nisi, dan Vega. Terima kasih untuk 40 harinya atas kerjasama, perhatian, dukungan, semangat, serta doa selama ini.
16. Teman-teman S1 Akuntansi 2017, terkhusus kelas Akuntansi Genap yang tidak dapat disebutkan satu per satu. Terima kasih atas informasi perkuliahan, bantuan, kerja sama, dan dukungannya selama masa perkuliahan. Semoga sukses untuk kalian.
17. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu per satu. Terima kasih atas segala dukungannya bagi keberhasilan dan kesuksesan penulis dalam menyelesaikan studi.

Atas bantuan dan dukungannya, penulis mengucapkan terimakasih, semoga mendapatkan balasan dari Allah SWT. Demikianlah, semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi yang membacanya.

Bandarlampung, 17 November 2021

Penulis

Sandy Ade Saputra

DAFTAR ISI

	Halaman
DAFTAR ISI	i
DAFTAR TABEL	iii
DAFTAR GAMBAR	iv
DAFTAR LAMPIRAN	v
I. PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang Masalah	1
1.2 Rumusan Masalah.....	9
1.3 Tujuan Penelitian	10
1.4 Manfaat Penelitian	10
II. TINJAUAN PUSTAKA	12
2.1 Landasan Teori	12
2.1.1 Teori Agensi	12
2.1.2 <i>Political Cost Hypothesis</i>	14
2.1.3 Koneksi Politik	15
2.1.4 Biaya Hutang	17
2.1.5 Kepemilikan Institusional	18
2.2 Penelitian Terdahulu.....	20
2.3 Pengembangan Hipotesis	26
2.3.1 Pengaruh Kepemilikan Perusahaan Terkoneksi Politik Terhadap Biaya Hutang	26
2.3.2 Pengaruh Dewan Direksi Terkoneksi Politik Terhadap Biaya Hutang	27
2.4 Kerangka Pemikiran	29
III. METODE PENELITIAN	30
3.1 Jenis Penelitian dan Gambaran dari Populasi (Objek) Penelitian.....	30
3.2 Teknik Pengambilan Sampel	32
3.3 Teknik Pengumpulan Data.....	32
3.4 Definisi Operasional dan Pengukuran Variabel.....	32
3.4.1 Biaya Hutang	33
3.4.2 Kepemilikan Perusahaan Terkoneksi politik	33
3.4.3 Dewan Direksi Terkoneksi Politik.....	34
3.4.4 Kepemilikan Institusional Sebagai Variabel Kontrol	35
3.5 Teknik Analisis Data	36

3.5.1 Statistik Deskriptif	36
3.5.2 Uji Asumsi Klasik.....	36
3.5.2.1 Uji Normalitas	37
3.5.2.2 Uji Multikolonieritas	37
3.5.2.3 Uji Heteroskedastisitas	37
3.5.2.4 Uji Autokorelasi	38
3.5.3 Pengujian Hipotesis	39
3.5.3.1 Analisis Regresi Berganda	39
3.5.3.2 Uji Koefisien Determinasi (R^2)	39
3.5.3.3 Uji Kelayakan Model (Uji F)	40
3.5.3.4 Uji Signifikansi Parameter Individual (Uji t)	40
IV. HASIL DAN PEMBAHASAN	42
4.1 Analisis Statistik Deskriptif	42
4.2 Uji Asumsi Klasik.....	44
4.2.1 Uji Normalitas	45
4.2.2 Uji Multikolinearitas.....	47
4.2.3 Uji Heteroskedastisitas	48
4.2.4 Uji Autokorelasi.....	49
4.2.5 Analisis Regresi Linier Berganda	51
4.3 Uji Hipotesis	52
4.3.1 Uji Koefisien Determinasi	52
4.3.2 Uji Kelayakan Model (Uji F).....	54
4.3.3 Uji Signifikansi Parameter Individual (Uji t).....	55
4.4 Pembahasan	57
4.4.1 Pengaruh Kepemilikan Perusahaan Terkoneksi Politik Terhadap Biaya Hutang	57
4.4.2 Pengaruh Dewan Direksi Terkoneksi Politik terhadap Biaya Hutang.....	59
4.4.3 Pembahasan Pengujian Kepemilikan Institusional Sebagai Variabel Kontrol	60
4.4.4 Pembahasan tambahan.....	61
V. KESIMPULAN DAN SARAN	62
5.1 Kesimpulan	62
5.2 Keterbatasan Penelitian.....	63
5.3 Saran	64
DAFTAR PUSTAKA	66

DAFTAR TABEL

Tabel

Halaman

Tabel 2.1. Ringkasan Penelitian.....	20
Tabel 3.1. Kriteria Penentuan Sampel.....	31
Tabel 4.1. Statistik Deskriptif	42
Tabel 4.2. Hasil Uji Normalitas	46
Tabel 4.3. Hasil Uji Multikolinearitas	47
Tabel 4.4. Hasil Uji Autokorelasi	50
Tabel 4.5. Hasil Analisis Regresi Linear Berganda.....	51
Tabel 4.6. Hasil Uji Determinasi	53
Tabel 4.7. Hasil Uji F.....	55
Tabel 4.8. Hasil Uji Signifikansi Parameter Individual (Uji t)	56

DAFTAR GAMBAR

Gambar

Halaman

Gambar 2.1. Kerangka Pemikiran.....	29
Gambar 4.1. Hasil Uji Normalitas	45
Gambar 4.2. Hasil Uji Heteroskedastisitas	49

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran	
Halaman	
Lampiran 1 : Daftar Sampel.....	71
Lampiran 2 : Hasil Tabulasi Data	73
Lampiran 3 : Uji Analisis Statistik Deskriptif	79
Lampiran 4 : Uji Normalitas	80
Lampiran 5 : Uji Multikolinearitas	81
Lampiran 6 : Uji Heteroskedastisitas	81
Lampiran 7 : Uji Model	82
Lampiran 8 : Uji ANOVA	82
Lampiran 9 : Uji Regresi.....	82

I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Indonesia merupakan salah satu negara yang memiliki pengaruh politik yang kuat dalam menjalankan praktik bisnisnya. Namun belum banyak penelitian yang membahas mengenai hubungan politik di industri dan karakteristik perusahaan yang terkoneksi politik di Indonesia. Koneksi politik sendiri merupakan bahasan yang cukup unik dikarenakan banyaknya perusahaan di Indonesia yang memiliki kedekatan dengan pemerintah yaitu dengan menempatkan direktur dan komisarisnya di dalam struktur organisasi perusahaan maupun sang pemilik saham memiliki koneksi politik dengan pemerintah.

Di Indonesia sendiri sejak zaman orde baru telah banyak memunculkan perusahaan yang terkoneksi politik. Dulu ada Liem Sioe Liong (Sudono Salim), pemilik Salim Group (Bank BCA, Bogasari, Indofood), Eka Tjipta Widjaja, pemilik Sinar Mas Group (Sinar Mas, Tjiwi Kimia, Bank BII), Bob Hasan, raja kayu lapis, pemilik Bank Umum Nasional, Bambang Trihatmodjo, Mochtar Ryadi, pemilik Lippo Group, Ciputra, pemilik Ciputra Group, dan masih ada beberapa lainnya. Beberapa dari konglomerat tersebut sekarang bermain di belakang layar. Pebisnis zaman sekarang pun juga masih ada seperti Aburizal Bakrie dengan Bakrie & Brothers Grupnya, Chairul Tanjung dengan Para

Goupnya (Bank Mega, Trans TV, Trans 7), Tommy Winata dengan Arta Graha Grupnya. Konglomerat-konglomerat di Indonesia yang menguasai industri hulu sampai hilir.

Dan setelah masa reformasi di Indonesia, koneksi politik semakin meluas ke segala bidang industri. Dimana perusahaan yang terkoneksi politik tidak lagi terpusat pada *regulated industry* saja, dikarenakan banyaknya investor yang memiliki jabatan di pemerintahan. Dari beberapa penelitian sebelumnya juga mendapatkan bahwa perusahaan dengan koneksi politik di negara berkembang memiliki beberapa keuntungan tersendiri dari adanya koneksi politik. Perusahaan yang terkoneksi politik atau memiliki hubungan politik dengan pemerintah akan mendapatkan manfaat berupa informasi, *networking*, dan lain-lain (Harymawan et al., 2017).

Adanya keterlibatan politik dalam struktur perusahaan baik sebagai dewan direksi maupun dewan komisaris sebenarnya tidak sepenuhnya diatur oleh undang-undang dan regulasi di Indonesia. Peraturan mengenai pengungkapan keterlibatan direktur dan komisaris dalam politik ditetapkan oleh OJK mengenai *Politically Exposed Person* (PEP) dalam industri jasa keuangan. Sehingga diperlukan adanya transparansi dan akuntabilitas perusahaan agar terciptanya kondisi dimana informasi keuangan dapat diakses secara terbuka. Dengan adanya koneksi politik diharapkan perusahaan dapat meningkatkan nilai perusahaan, karena perusahaan yang terkoneksi politik dapat memanfaatkan hubungan politiknya dengan pemerintah untuk mendapatkan peluang bisnis yang

menguntungkan.

Berdasarkan (Amelia, 2013) perusahaan yang mempunyai hubungan politik cenderung akan lebih dipercaya oleh pihak kreditur dalam melakukan pengembalian peminjaman dana karena proporsi kepemilikan saham yang dimiliki pihak yang memiliki koneksi politik pada perusahaan tersebut lebih besar. Sedangkan perusahaan memerlukan adanya sumber dana untuk menunjang kegiatan operasional perusahaan.

Untuk menunjang perkembangan bisnis dan juga dalam kegiatan untuk menjalankan aktivitas operasinya suatu perusahaan memerlukan adanya sumber dana. Sumber dana perusahaan merupakan salah satu pembahasan yang sangat penting, karena dana yang telah diperoleh akan digunakan dalam kegiatan operasional perusahaan, sehingga sumber dana merupakan penentu apakah perusahaan dapat beroperasi atau tidak. Umumnya sumber dana perusahaan dikelompokkan ke dalam tiga kategori yakni sumber dana jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang.

Sumber dana perusahaan bisa berasal dari pihak internal maupun pihak eksternal. Pendanaan yang berasal dari pihak internal merupakan sumber dana yang berasal dari perusahaan itu sendiri dimana umumnya didapatkan dari laba perusahaan yang telah diperoleh pada periode sebelumnya. Sedangkan sumber dana yang berasal dari pihak eksternal seperti dari kreditur, supplier, bank, dan pasar modal. Perusahaan juga mempunyai beberapa cara dalam melakukan pendanaan bagi perusahaannya, salah satunya dengan cara menggunakan hutang.

Hutang merupakan sumber dana yang diperoleh melalui dari pihak eksternal perusahaan yakni dari kreditur. Berbagai macam pinjaman yang berasal dari hutang seperti hutang bank, obligasi, atau surat hutang lainnya. Perusahaan yang memiliki hutang, memiliki kewajiban untuk membayar hutangnya dalam jangka waktu yang telah ditentukan. Menurut (Sunyoto, 2013) terdapat berbagai macam pinjaman yang berasal dari hutang diantaranya dikategorikan menjadi tiga kelompok, yaitu hutang lancar, hutang jangka panjang, dan hutang lain-lain.

Dalam memberikan pinjaman berupa hutang kepada perusahaan, pihak kreditur perlu memperhatikan risiko-risiko yang dapat terjadi pada perusahaan tersebut. Dan kreditur dapat mengantisipasi risiko tersebut dengan cara membebankan tingkat bunga pada uang yang dipinjam oleh perusahaan. Bunga yang dibayarkan oleh perusahaan kepada kreditur harus dibayarkan sampai dengan lunas bersamaan dengan pembayaran hutang perusahaan. Berdasarkan (Swissia & Purba, 2018) biaya yang berasal dari hutang yaitu berupa bunga maka disebut sebagai biaya hutang.

Ketidakmampuan perusahaan dalam melunasi hutang kepada kreditur dan bunga yang dihasilkan dari pinjaman tersebut dapat terjadi di setiap perusahaan apabila tidak cermat dalam melakukan pinjaman. Seperti contoh kasus yang terjadi pada perusahaan properti yaitu PT Agung Podomoro Land Tbk. Berdasarkan berita dari *cnn.com* (P Saragih & Sidik, 2019) terdapat permasalahan keuangan pada PT Agung Podomoro Land Tbk. Agung Podomoro terancam tidak mampu membayar hutang-hutangnya terkait dengan kredit

sindikasi dari enam bank sebesar Rp 1,3 triliun yang akan jatuh tempo pada Juni 2020. Jatuh tempo hutang sindikasi ini maju menjadi Juni 2019 Akibat perusahaan menarik pinjaman sindikasi baru dari tiga bank sebesar Rp 2,6 triliun untuk membayar hutang-hutangnya dalam 12-18 bulan ke depan.

Faktor yang berpengaruh yaitu koneksi politik dimana perusahaan yang mempunyai hubungan politik cenderung akan lebih dipercaya oleh pihak kreditur dalam melakukan pengembalian peminjaman dana karena proporsi kepemilikan saham yang dimiliki pihak yang memiliki koneksi politik pada perusahaan tersebut lebih besar (Furi, 2019). Penelitian sebelumnya yang berkaitan dengan variabel koneksi politik dilakukan oleh (Amelia, 2013) yang menunjukkan bahwa koneksi politik berpengaruh signifikan terhadap biaya hutang. Sedangkan hasil penelitian yang dilakukan oleh (Harjan, Teng, Sadaqat, et al., 2019) berbeda dengan yang dilakukan oleh (Amelia, 2013) yang menyatakan bahwa biaya hutang dan koneksi politik berhubungan negatif dan signifikan dan penelitian (Furi, 2019) bahwa koneksi politik tidak berpengaruh terhadap biaya hutang. Berdasarkan (Amelia, 2013) perusahaan yang memiliki hubungan dengan pemerintah dianggap akan memberikan contoh yang baik kepada perusahaan-perusahaan lainnya untuk membayar pinjaman dana dari eksternal sesuai dengan jangka waktu yang telah ditentukan. Karena perusahaan yang memiliki hubungan politik cenderung memiliki citra yang lebih baik karena mempresentasikan pemerintah dalam melakukan kegiatan operasional perusahaannya.

Kemudian di penelitian ini, ingin mengetahui apakah dewan direksi yang terkoneksi politik memiliki pengaruh terhadap biaya hutang. (Bliss & Gul, 2012) mengartikan koneksi politik sebagai sebuah hubungan yang dekat diantara pejabat tinggi perusahaan atau mengontrol *shareholders* dengan individu yang memiliki koneksi politik. Kreditur berpikir bahwa direksi yang terkoneksi politik memainkan peran penting dalam mengelola perusahaan dengan memberikan pengalaman mereka dalam bisnis ke manajemen perusahaan. Dewan direksi yang terkoneksi politik juga membantu perusahaan untuk mendapatkan kemudahan akses untuk keperluan pendanaan, seperti pinjaman bank (Boubakri et al., 2012). Contoh dewan direksi yang terkoneksi politik adalah dewan direksi yang sedang atau pernah memegang jabatan di pemerintahan, seperti hakim, anggota partai politik, kepolisian, anggota legislatif. Perusahaan yang memiliki dewan direksi yang terkoneksi politik merupakan suatu keuntungan, karena dewan direksi dapat menjamin kontrak dengan pemerintah atau menjaga hubungan yang baik dengan pemerintah (Shin et al., 2018). Peneliti (Bliss & Gul, 2012) menyatakan bahwa dewan direksi yang terkoneksi politik memiliki biaya hutang yang lebih besar. Penelitian yang menggunakan dewan direksi atau pimpinan tinggi perusahaan sebagai variabel penelitian pernah dilakukan oleh (Claessens et al., 2008; Fisman, 2001). Penelitian-penelitian tersebut menggunakan pimpinan tinggi perusahaan dan pemegang saham yang berhubungan dengan partai politik maupun pemerintah.

Lalu yang terakhir yaitu kepemilikan institusional. Kepemilikan institusional merupakan proporsi kepemilikan saham pada akhir periode yang dimiliki oleh lembaga, seperti asuransi, bank atau institusi lain (Dian & Lidyah, 2014). Adanya peningkatan kepemilikan institusi dalam perusahaan menyediakan insentif yang cukup besar bagi para investor untuk dapat aktif mengawasi dan mempengaruhi kebijakan manajemen perusahaan. Akibat adanya pengawasan oleh investor institusional mampu membuat manajer lebih fokus terhadap kinerja perusahaan dan menghindari adanya perilaku yang menguntungkan diri sendiri. Dari beberapa penelitian sebelumnya seperti (Rebecca & Siregar, 2012) meneliti tentang “Pengaruh *corporate governance index*, kepemilikan keluarga, dan kepemilikan institusional terhadap biaya ekuitas dan biaya hutang”.

Penulis memilih perusahaan pertambangan, karena dengan pertumbuhan yang cepat dalam 20 tahun terakhir, sektor batu bara telah menjadi salah satu sumber utama pendanaan politik di Indonesia, baik di tingkat nasional maupun daerah. Pemain kunci di industri batu bara memainkan peranan penting dalam pemilihan presiden 2019. Para calon dan tim inti kampanye berbisnis dan terkait dengan sektor batu bara. Berdasarkan laporan (*Greenpeace*, 2019) terdapat nama pejabat besar politik yang terlibat di dalam perusahaan pertambangan. Diantaranya Luhut Binsar Pandjaitan dengan PT Toba Sejahtera miliknya. Kemudian juga disebut mantan Ketua Umum Partai Golkar Aburizal Bakrie yang berhubungan dengan Bumi Resources dan Prabowo Subianto Ketua Umum Partai Gerindra dengan grup bisnis Nusantara miliknya.

Meskipun pertumbuhan ini terjadi seakan-akan karena letak pertambangan yang berdekatan dengan pelabuhan dan lokasi geografis yang strategis. Penelitian oleh (Atwood, 2017) menunjukkan bahwa pertumbuhan ini sebetulnya terjadi oleh karena adanya subsidi. Laporan tersebut mengidentifikasi 15 subsidi kepada industri batu bara Indonesia dalam bentuk pemindahan tanggung jawab baik secara langsung maupun tidak langsung, , pengadaan barang dan jasa dibawah nilai pasar, dan lain-lain. Di samping itu, laporan ini menghitung bahwa kebijakan itu bernilai sebesar Rp 12,4 triliun (946 juta dollar AS) pada tahun 2014, sementara pada tahun 2015, subsidi yang diberikan untuk produksi batu bara diperkirakan bernilai sebesar sekitar Rp 8,5 triliun (644 juta dollar AS).

Penulis memilih koneksi politik yang berhubungan dengan biaya hutang karena menurut penulis faktor tersebut sering menjadi alasan terjadinya gagal bayar hutang maupun kebangkrutan pada perusahaan manufaktur di Indonesia. Berdasarkan uraian diatas, variabel independen yang digunakan dalam penelitian ini adalah kepemilikan perusahaan terkoneksi politik dan dewan direksi terkoneksi politik. Dengan variabel kontrolnya adalah kepemilikan institusional. Variabel dependennya adalah biaya hutang. Penulis memilih perusahaan pertambangan karena sektor batu bara yang para pelakunya saling akrab dan dekat dengan ketergantungan yang besar pada peraturan pemerintah dan perizinan sangat terkait dengan politik dan pejabat politik. Alhasil, pertumbuhan dan tingkat keuntungan dari pertambangan batu bara sejak reformasi mengalami peningkatan. Dalam waktu yang singkat, industri batu bara Indonesia menjadi pemain besar dalam pasar batu bara di Asia

Penelitian ini menggunakan periode perusahaan pertambangan yang terdaftar di BEI dalam kurun waktu 2015-2019. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya yaitu penelitian ini menggunakan kurun waktu yang lebih terbaru yaitu 2015-2019. Penelitian ini juga terdapat variabel kontrol yaitu variabel kepemilikan institusional dalam penelitian. Hal ini dilakukan dengan agar dapat menjelaskan koneksi politik terhadap biaya hutang secara komprehensif.

Dan dari berbagai hasil penelitian yang belum konsisten pada penelitian sebelumnya juga menjadi faktor ketertarikan peneliti dengan tujuan untuk menguji ulang dengan pengembangan variabel lainnya dan rentang waktu tahun 2015-2019. Berdasarkan berbagai uraian yang telah dijelaskan diatas, maka peneliti memilih judul “ **Pengaruh Koneksi Politik Terhadap Biaya Hutang Pada Perusahaan Pertambangan yang terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Periode 2015 – 2019 .“**

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka permasalahan yang akan diuji dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut:

1. Apakah kepemilikan perusahaan yang memiliki koneksi politik berpengaruh terhadap biaya hutang ?
2. Apakah dewan direksi yang memiliki koneksi politik berpengaruh terhadap biaya hutang ?

1.3 Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh perusahaan terkoneksi politik terhadap biaya hutang sehingga peneliti memproksikan menjadi dua variabel.

Maka penelitian ini bertujuan untuk menganalisis :

1. Pengaruh kepemilikan perusahaan yang memiliki koneksi politik terhadap biaya hutang.
2. Pengaruh dewan direksi yang memiliki koneksi politik terhadap biaya hutang.

1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi untuk penelitian selanjutnya dimana manfaat yang akan diperoleh berguna untuk :

1. Bagi Akademisi
Diharapkan dapat menambah pengetahuan mengenai adanya koneksi politik sehingga dapat mempengaruhi biaya hutang perusahaan yang lebih terbarukan dengan objek penelitian yaitu perusahaan pertambangan yang terdaftar di BEI tahun 2015-2019 serta dapat menjadi referensi bagi para peneliti selanjutnya di masa mendatang.
2. Bagi Praktisi
Hasil penelitian ini dapat dijadikan bahan pertimbangan bagi calon investor dalam membuat keputusan investasi di pasar modal. Penelitian

ini juga diharapkan dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan bagi emiten dalam mempertimbangkan hal-hal yang berkaitan dengan beberapa faktor yang dapat meningkatnya biaya hutang, sehingga aktivitas operasional perusahaan dapat berjalan sesuai dengan tujuan perusahaan yakni mendapatkan laba yang maksimal.

II. TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Landasan Teori

2.1.1 Teori Agensi

Teori keagenan merupakan teori yang menjelaskan tentang suatu fenomena antara pemegang saham (*principal*) dan manajer perusahaan (agen) atas perbedaan kepentingan (Jensen & Meckling, 1976). Pemegang saham yang sebagai *principal* memberikan kewenangan kepada manajer perusahaan yang bertindak sebagai agen untuk melakukan operasional perusahaan, maka hal tersebut menimbulkan ketimpangan informasi atau yang sering disebut dengan asimetri informasi karena manajer perusahaan mendapatkan informasi tentang perusahaan yang lebih banyak dibandingkan dengan pemegang saham yang kemungkinan besar manajer dapat melakukan manipulasi data dalam informasi yang didapatkan sehingga hal tersebut yang tidak diinginkan oleh pemegang saham (Swissia & Purba, 2018)

Menurut (Meiriasari, 2017b) teori keagenan digunakan untuk mengatasi dua permasalahan yang terjadi pada hubungan keagenan yaitu yang pertama adanya perbedaan kepentingan maupun tujuan antara *agen* dan *principal* dimana hal tersebut menyulitkan *principal* dalam pengambilan keputusan. Permasalahan kedua yaitu adanya perbedaan dalam sikap menghadapi risiko. Kemudian perlu

adanya tindakan dari perusahaan untuk dapat mengatasi konflik keagenan yang diharapkan akan memberikan kepercayaan kepada manajer perusahaan dalam mengelola sumber pendanaan yang berasal dari pemegang saham. Dalam fenomena biaya hutang pendekatan *agency theory* menjelaskan fenomena yang terjadi karena adanya perbedaan kepentingan antara agen (manajer) dengan *principal* (pemegang saham) yang disebabkan oleh adanya asimetri informasi antara agen (manajer) yang memiliki informasi lebih baik dibandingkan dengan *principal*.

Pemegang saham selaku *principal* ingin risiko yang rendah untuk menjaga kestabilan perusahaan, sedangkan manajemen perusahaan selaku agen yang lebih banyak memiliki informasi terkait perusahaan ingin mendapatkan keuntungan bagi perusahaan meskipun harus mengorbankan kepentingan *principal*. Menurut teori agensi yang dikemukakan oleh Jensen dan Meckling menyatakan bahwa perusahaan memisahkan fungsi pengelolaan dengan fungsi kepemilikan karena keduanya rentan terhadap masalah keagenan. Seperti dewan direksi yang memiliki hubungan politik ingin mendapatkan sumber dana perusahaan yang lebih dengan menggunakan adanya hubungan politik dengan pemerintah untuk lebih mudah untuk mendapatkan pinjaman berupa hutang guna menjalankan aktivitas operasional perusahaan sehingga dapat meningkatkan produksi dan menciptakan keuntungan yang lebih. Sedangkan pemegang saham ingin menekan risiko yang ada berupa timbulnya biaya hutang demi menjaga kestabilan dan keberlangsungan perusahaan. Akibat perbedaan kepentingan inilah yang memicu adanya konflik keagenan. Sehingga diperlukan adanya kontrol dari struktur kepemilikan untuk

meminimalisir adanya konflik antara *principal* dan agen.

2.1.2 Political Cost Hypothesis

Menurut (Watts & Zimmerman, 1986) hipotesis biaya politik menjelaskan tentang fenomena bahwa perusahaan-perusahaan besar dengan pangsa pasar dan laba yang sangat besar akan mendapat perhatian publik yang besar pula. Perusahaan seperti ini biasanya dituntut memenuhi standar kinerja operasi dan kinerja lingkungan yang tinggi.. Dengan adanya biaya politik yang lebih besar maka akan membagi kemakmuran perusahaan kepada lebih banyak pihak, maka laba tahun sekarang ditransfer ke laba tahun depan agar laba tahun sekarang menjadi lebih sedikit. Hal ini dilakukan untuk menghindari biaya politik yang akan dikenakan oleh pemerintah. Dalam pemilihan kebijakan akuntansi dipengaruhi juga oleh dimensi politik perusahaan.

Dalam penelitian ini, para politisi yang juga sekaligus merupakan top eksekutif perusahaan berkuasa untuk melindungi kepentingan bisnis yang menguntungkan untuk mereka sehingga perusahaan – perusahaan dieksploitasi untuk memenuhi kepentingan politisi dan birokrat. Dengan meningkatnya pula investasi di Indonesia dapat mendorong para politisi tersebut untuk menanamkan saham mereka pada perusahaan swasta, hal ini dapat mengakibatkan politisi tersebut menggunakan kekuasaannya untuk menguntungkan bisnis pribadi mereka karena banyak kemudahan yang bisa didapat oleh perusahaan salah satunya yaitu mendapatkan pinjaman (biaya utang).

Didasarkan dari hipotesis biaya politik, dengan adanya koneksi politik akan mendapatkan keuntungan dengan adanya kedekatan dengan pemerintah melalui perlakuan khusus seperti regulasi yang dipermudah, *bailouts*, akses yang dipermudah untuk mendapatkan sumber daya, persyaratan pinjaman dan perdagangan yang menguntungkan, sehingga akan meningkatkan kinerja perusahaan. Sebaliknya, dengan adanya kedekatan dengan pemerintah dapat merugikan atau merusak citra pemerintah karena adanya keterlibatan dalam korupsi, *enrichment*, *expropriation*, dan *rent-seeking behavior* yang menyebabkan turunnya citra pemerintah. Kemungkinan terjadinya kejadian ini bergantung pada persentase kepemilikan pemerintah dalam perusahaan. Dengan adanya hasil yang berbeda-beda dari berbagai penelitian terdahulu antara koneksi politik dengan biaya hutang, membuat topik ini menarik untuk dibahas.

2.1.3 Koneksi Politik

Koneksi politik merupakan suatu keadaan dimana adanya hubungan antara pihak satu dengan yang lainnya yang mempunyai kepentingan dalam hal politik dengan tujuan yang sama untuk mencapai keuntungan dari kedua pihak (Purwanti & Sugiyarti, 2017).

Perusahaan dapat dikatakan memiliki hubungan politik apabila paling tidak salah satu dari pimpinan perusahaan, pemegang saham atau kerabat mereka pernah atau sedang menjabat sebagai pejabat tinggi negara, anggota parlemen, atau pengurus partai yang menjadi perwakilan di parlemen (Faccio et al., 2006)

(Butje & Tjondro, 2014) menyatakan dalam menyusun strategi bersaing perusahaan harus mampu mencari dan memanfaatkan peluang dalam lingkungan bisnis, salah satunya melalui koneksi politik.

Perusahaan yang terkoneksi politik adalah perusahaan yang dengan cara-cara tertentu mempunyai ikatan secara politik atau mengusahakan adanya kedekatan dengan politisi atau pemerintah (Tiffani & Marfuah, 2015).

Maka dapat disimpulkan bahwa koneksi politik adalah hubungan antara pihak perusahaan dengan pejabat tinggi negara atau pengurus partai yang menjadi perwakilan di parlemen yang memiliki tujuan yang sama untuk memperoleh keuntungan yang akan di dapatkan di antara kedua belah pihak.

Menurut (Purwanti & Sugiyarti, 2017) adanya perlakuan khusus yang didapat perusahaan dalam hal hubungannya dengan koneksi politik diantaranya yaitu dapat dengan mudah memperoleh pinjaman modal, adanya risiko yang rendah dalam hal pemeriksaan pajak. Menurut (Harjan, Teng, Sadaqat, et al., 2019) kepemilikan perusahaan yang mempunyai hubungan politik dapat dimungkinkan untuk memperoleh pembiayaan rendah. Hal tersebut didukung beberapa penelitian di berbagai penelitian yaitu diantaranya di negara Indonesia, Malaysia, Vietnam, dan Korea.

Kemudian dalam penelitian ini peneliti ingin mengetahui apakah dewan direksi yang terkoneksi politik memiliki pengaruh terhadap biaya hutang perusahaan. Dewan direksi terkoneksi politik dapat dikatakan memiliki hubungan politik apabila paling tidak salah satu dari dewan direksi atau kerabat mereka

pernah atau sedang menjabat sebagai pejabat tinggi negara, anggota parlemen, atau pengurus partai yang menjadi perwakilan di parlemen Karena dewan direksi memiliki tanggung jawab yaitu dewan direksi harus bertanggung jawab penuh atas pengelolaan perusahaan untuk kepentingan dan tujuan perusahaan. Selain itu dewan direksi wajib membuat dan memelihara daftar pemegang saham, menyelenggarakan pembukuan perusahaan, melaporkan kepemilikan sahamnya dan keluarga yang dimiliki pada perusahaan. Karena dewan direksi memiliki tanggung jawab atas aktivitas operasional perusahaan, maka peran dewan direksi terhadap keberlangsungan perusahaan sangat besar. Hasil penelitian (Bliss & Gul, 2012) menyatakan bahwa dewan direksi yang terkoneksi politik memiliki biaya hutang yang lebih besar. Sehingga apabila dewan direksi menggunakan koneksi politiknya untuk memiliki kemudahan akses agar lebih mudah mendapatkan pinjaman kredit dari bank.

2.1.4 Biaya Hutang

Biaya hutang merupakan tingkat bunga yang diharapkan kreditur dimana perusahaan harus membayar pinjaman yang dilakukan perusahaan tersebut (Swissia & Purba, 2018). Menurut (Syahwier & Fitriani, 2018) biaya hutang adalah ketika perusahaan mempunyai hutang dan harus membayar tingkat pengembalian berupa bunga yang diberikan kepada kreditur dari perusahaan sampai hutang tersebut dapat terselesaikan atau lunas. Maka dapat ditarik kesimpulan dari pengertian diatas, bahwa biaya hutang dapat dikatakan sebagai biaya yang disebabkan oleh hutang yaitu berupa bunga. Biaya hutang atau *Cost Of*

Debt merupakan elemen penting pada struktur modal yang berpengaruh pada faktor pajak dan hutang pajak, yang dimana beban bunga bisa digunakan untuk pengurangan pajak terhutang (Syahwier & Fitriani, 2018).

2.1.5 Kepemilikan Institusional

Kepemilikan institusional adalah proporsi kepemilikan saham pada akhir tahun yang dimiliki oleh lembaga, seperti asuransi, bank atau institusi lain (Dian & Lidyah, 2014).

Para investor institusional ini biasanya bertindak sebagai pihak yang memonitor jalannya sebuah perusahaan, dan dalam melakukan monitoring investor institusional ini lebih berpihak kepada para pemegang saham. Kepemilikan institusional ini merupakan salah satu faktor yang dapat mempengaruhi kinerja perusahaan.

Adanya kepemilikan institusional di suatu perusahaan akan mendorong peningkatan pengawasan agar lebih optimal terhadap kinerja manajemen, karena kepemilikan saham mewakili suatu sumber kekuasaan yang dapat digunakan untuk mendukung atau sebaliknya terhadap kinerja manajemen (Dian & Lidyah, 2014).

Pengawasan yang dilakukan oleh investor institusional sangat bergantung padabesarnya investasi yang dilakukan. Menurut (Nuraina, 2010) semakin tinggi kepemilikan institusional pada suatu perusahaan maka akan semakin kuat kontrol eksternal terhadap perusahaan dan *mengurangi agency cost*, sehingga perusahaan

akan menggunakan dividen yang rendah. Dengan adanya kontrol yang ketat, menyebabkan manajer menggunakan hutang pada tingkat rendah untuk mengantisipasi kemungkinan terjadinya *financial distress* dan risiko kebangkrutan.

Kepemilikan institusional pada umumnya memiliki proporsi kepemilikan dalam jumlah yang besar sehingga proses monitoring terhadap manajer menjadi lebih baik (Wiranata & Nugrahanti, 2013). Semakin besar kepemilikan institusi keuangan maka akan semakin besar kekuatan suara dan dorongan dari institusi keuangan tersebut untuk mengawasi manajemen dan akibatnya akan memberikan dorongan yang lebih besar untuk mengoptimalkan nilai perusahaan sehingga kinerja perusahaan akan meningkat. Pengaruh investor institusional terhadap manajemen perusahaan dapat menjadi sangat penting serta dapat digunakan untuk menyelaraskan kepentingan manajemen dan pemegang saham. Hal ini disebabkan karena jika tingkat kepemilikan manajerial tinggi dapat berdampak buruk terhadap perusahaan karena menimbulkan masalah pertahanan, yang berarti jika kepemilikan manajerial tinggi, para manajer memiliki posisi yang kuat untuk melakukan suatu kontrol terhadap perusahaan dan pihak pemegang saham eksternal akan mengalami kesulitan untuk mengendalikan tindakan para manajer.

Peneliti menggunakan variabel kontrol kepemilikan institusional pada penelitian ini. Seperti diketahui bahwa variabel biaya hutang merupakan variabel terikat sedangkan variabel bebasnya adalah koneksi politik. Namun, biaya hutang tidak hanya dipengaruhi oleh koneksi politik, ada banyak faktor lain yang mempengaruhi pula. Faktor-faktor seperti perusahaan yang memiliki kepemilikan

institusional lebih besar bisa saja akan mempengaruhi biaya hutang perusahaan. Oleh karena itu, agar tidak mempengaruhi variabel terikat, faktor seperti ini harus dikontrol secara ketat dan dijadikan variabel kontrol dalam penelitian.

2.2 Penelitian Terdahulu

Tabel 2.1. Ringkasan Penelitian

No	Peneliti	Judul	Hasil
1.	(Wardani & Rumahorbo, 2018)	Pengaruh Penghindaran Pajak, Tata Kelola dan Karakteristik Perusahaan terhadap Biaya Hutang	<ol style="list-style-type: none"> 1. <i>Tax avoidance</i> tidak berpengaruh terhadap biaya hutang. 2. Komisaris Independen tidak berpengaruh terhadap biaya hutang. 3. Kepemilikan manajerial berpengaruh terhadap biaya hutang. 4. Komite audit tidak berpengaruh terhadap biaya hutang. 5. Ukuran perusahaan tidak berpengaruh terhadap biaya hutang
2.	(Santosa & Kurniawan, 2017)	Analisis Pengaruh <i>Tax avoidance</i> terhadap Cost of Debt pada Perusahaan Manufaktur yang terdaftar di BEI selama Periode 2010-2014	<i>Tax avoidance</i> berpengaruh positif signifikan terhadap biaya hutang

3	(Rebecca & Siregar, 2012)	Pengaruh <i>Corporate Governance Index</i> , Kepemilikan Keluarga, dan Kepemilikan Institusional terhadap Biaya Ekuitas dan Biaya Hutang: Studi Empiris pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di BEI	<ol style="list-style-type: none"> 1. <i>Corporate Governance Index</i> memiliki pengaruh negative terhadap biaya ekuitas dan biaya hutang perusahaan. 2. Kepemilikan keluarga memiliki pengaruh signifikan positif terhadap biaya ekuitas perusahaan. 3. Kepemilikan keluarga tidak berpengaruh signifikan terhadap biaya hutang. 4. Kepemilikan institusional tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap biaya ekuitas 5. Kepemilikan institusional terbukti berpengaruh signifikan negative terhadap biaya hutang.
4.	(Swissia & Purba, 2018)	Pengaruh Struktur Kepemilikan Institusional, Kepemilikan Manajerial, Kepemilikan Keluarga, Pengungkapan Sukarela dan Leverage terhadap Biaya Hutang	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kepemilikan institusional, kepemilikan manajerial, kepemilikan keluarga berpengaruh signifikan terhadap biaya hutang perusahaan 2. Pengungkapan sukarela, <i>leverage</i> tidak berpengaruh signifikan terhadap biaya hutang.

5.	(Amelia, 2013)	Analisis Pengaruh Hubungan Politik dan Kepemilikan Keluarga terhadap Biaya Hutang dan Biaya Ekuitas (Studi Empiris pada Perusahaan Manufaktur yang terdaftar di BEI)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Hubungan politik memiliki pengaruh signifikan positif terhadap biaya hutang perusahaan. 2. Hubungan politik tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap biaya ekuitas perusahaan. 3. Kepemilikan keluarga tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap biaya hutang dan biaya ekuitas perusahaan 4. Hubungan politik yang dimiliki perusahaan dengan struktur kepemilikan keluarga dapat berpengaruh positif pada kepemilikan keluarga terhadap biaya hutang. 5. Hubungan politik yang dimiliki perusahaan dengan kepemilikan keluarga tidak berpengaruh terhadap biaya ekuitas perusahaan.
6	(Harjan, Teng, Sadaqat, et al., 2019)	<i>Political Connections and Cost of Debt Financing: Empirical Evidence from China</i>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Hubungan negatif dan signifikan antara biaya hutang dan perusahaan yang mempunyai hubungan politik. 2. Hubungan negatif antarbiaya hutang dan direksi yang mempunyai hubungan politik

7.	(Perdana & Kusumastuti, 2011)	<i>Analysis of The Impacts of Family Ownership on a Company's Costs of Debt</i>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kepemilikan keluarga berpengaruh positif signifikan terhadap biaya hutang. 2. Kepemimpinan oleh CEO atau ketua pendiri tidak memiliki hubungan yang signifikan dengan biaya hutang.
8.	(Ashkhabi & Agustina, 2015)	Pengaruh <i>Corporate Governance</i> , Struktur Kepemilikan Perusahaan dan Ukuran Perusahaan terhadap Biaya Hutang	<ol style="list-style-type: none"> 1. <i>Corporate Governance index</i> dan kepemilikan institusional berpengaruh negatif terhadap biaya hutang. 2. Ukuran perusahaan berpengaruh positif terhadap biaya hutang. 3. Kepemilikan manajerial tidak berpengaruh terhadap biaya hutang
9.	(Masri & Martani, 2014)	<i>Tax avoidance Behavior Towards the Cost of debt</i>	<ol style="list-style-type: none"> 1. <i>Tax avoidance</i> berpengaruh positif pada biaya hutang. 2. Struktur kepemilikan keluarga menyebabkan pengaruh yang besar terhadap penghindaran pajak pada biaya hutang sehingga 3. kepemilikan keluarga meningkatkan perilaku agresif pajak.
10.	(Meiriasari, 2017)	Pengaruh <i>Corporate governance</i> , Kepemilikan Keluarga, Kepemilikan Institusional dan Ukuran Perusahaan (<i>Firm Size</i>) terhadap Biaya Hutang	<ol style="list-style-type: none"> 1. <i>Corporate governance</i>, kepemilikan institusional dan ukuran perusahaan (<i>firm size</i>) berpengaruh signifikan negatif terhadap biaya hutang. 2. Kepemilikan keluarga tidak mempunyai pengaruh terhadap biaya hutang.

11	(Ifada & Muhiyatul, 2017)	Faktor- faktor yang berpengaruh terhadap Kebijakan Hutang Perusahaan (Studi Empiris Perusahaan Manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2012-2014)	<ol style="list-style-type: none"> 1. <i>Free cash flow</i> berpengaruh negatif dan signifikan terhadap kebijakan hutang. 2. Kepemilikan Manajerial tidak berpengaruh terhadap kebijakan hutang. 3. Kebijakan dividen berpengaruh positif dan signifikan terhadap kebijakan hutang. 4. Ukuran perusahaan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kebijakan hutang.
12	(Novianti, 2014)	Pengaruh Penghindaran Pajak terhadap Biaya Hutang (Studi Kasus Perusahaan Manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2010-2012)	Penghindaran pajak tidak berpengaruh positif terhadap biaya hutang dikarenakan perusahaan manufaktur yang menjadi sampel penelitian lebih menyukai sumber pendanaan internal yaitu modal dan laba dibandingkan sumber pendanaan eksternal berupa hutang.
13	(Sadjiarto et al., 2019)	Kepemilikan Saham sebagai Determinan <i>Cost of Debt</i>	Berdasarkan hasil pengujian penelitian ini dapat disimpulkan bahwa <i>tax avoidance</i> memiliki pengaruh terhadap <i>cost of debt</i> . Untuk hasil pengujian variabel moderasi terhadap <i>cost of debt</i> hanya satu dari tiga variabel penelitian yang terbukti

			<p>berpengaruh signifikan negatif terhadap <i>cost of debt</i> yaitu <i>institutional ownership</i>. Sedangkan <i>family ownership</i> dan <i>public ownership</i> tidak berpengaruh terhadap <i>cost of debt</i>.</p> <p>Hasil pengujian variabel kontrol dari penelitian ini adalah variabel <i>age</i>, <i>leverage</i> dan <i>size</i> memiliki pengaruh negatif signifikan terhadap COD. Sedangkan variabel CFO berpengaruh positif signifikan terhadap COD.</p>
14	(Bliss & Gul, 2012)	Political Connections and Cost of Debt Financing: Empirical Evidence from China	<ol style="list-style-type: none"> 1. Perusahaan terkoneksi politik berhubungan negatif dan signifikan terhadap biaya hutang. 2. Dewan Direksi terkoneksi politik berhubungan negatif terhadap biaya hutang
15	(Furi, 2019)	Pengaruh <i>Tax avoidance</i> , Karakteristik Perusahaan, Struktur Kepemilikan Keluarga, Koneksi Politik terhadap Biaya Hutang Pada Perusahaan Manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2016-2018	<ol style="list-style-type: none"> 1. <i>Tax avoidance</i> tidak berpengaruh terhadap biaya hutang 2. Ukuran perusahaan berpengaruh positif dan terhadap biaya hutang 3. Struktur kepemilikan keluarga tidak berpengaruh terhadap biaya hutang <p>Koneksi politik tidak berpengaruh terhadap biaya hutang</p>

16	(Sutarti et al.,2018)	Pengaruh Tata Kelola Perusahaan dan Penghindaran Pajak terhadap Biaya Hutang dengan Kepemilikan Institusional sebagai Variabel Moderating (Studi Kasus pada Perusahaan Manufaktur yang terdaftar di BEI penelitian tahun 2012-2016)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ukuran dewan komisaris, ukuran komite audit dan penghindaran pajak secara statistik berpengaruh positif dan signifikan terhadap biaya hutang. 2. Kepemilikan institusional memoderasi antara ukuran dewan komisaris dengan biaya hutang, sedangkan kepemilikan institusional memoderasi antara komite audit dengan biaya hutang. 3. Kepemilikan institusional memoderasi antara penghindaran pajak dengan biaya hutang
----	-----------------------	---	---

2.3 Pengembangan Hipotesis

2.3.1 Pengaruh Kepemilikan Perusahaan Terkoneksi Politik Terhadap Biaya Hutang

Kepemilikan Perusahaan dikatakan memiliki hubungan politik apabila paling tidak salah satu dari pimpinan perusahaan, pemegang saham atau kerabat mereka pernah atau sedang menjabat sebagai pejabat tinggi negara, anggota parlemen, atau pengurus partai yang menjadi perwakilan di parlemen dengan tujuan yang sama untuk memperoleh keuntungan. Penelitian yang dilakukan oleh (Amelia, 2013) serta (Bliss & Gul, 2012) menunjukkan bahwa adanya pengaruh

signifikan positif terhadap kepemilikan perusahaan terkoneksi politik dengan biaya hutang.

Hal tersebut dikarenakan perusahaan dengan struktur kepemilikan saham yang dimiliki oleh pemerintah maupun pengurus partai dengan proporsi yang lebih besar akan lebih dipercaya oleh pihak kreditur. Sehingga perusahaan diharapkan dapat mampu mengembalikan pinjaman pada periode berikutnya karena pemerintah menjadi pemegang saham mayoritas pada perusahaan tersebut. Dan hasil penelitian yang dilakukan oleh (Harjan, Teng, Sadaqat, et al., 2019) dan (Tee, 2019) yang menyatakan bahwa biaya hutang dan kepemilikan perusahaan terkoneksi politik berhubungan negatif dan signifikan, serta (Furi, 2019) bahwa kepemilikan perusahaan terkoneksi politik tidak berpengaruh terhadap biaya hutang. Berdasarkan uraian diatas, maka hipotesis pertama yang diajukan pada penelitian ini adalah:

H1 : Kepemilikan perusahaan terkoneksi politik berpengaruh negatif terhadap biaya hutang

2.3.2 Pengaruh Dewan Direksi Terkoneksi Politik Terhadap Biaya Hutang

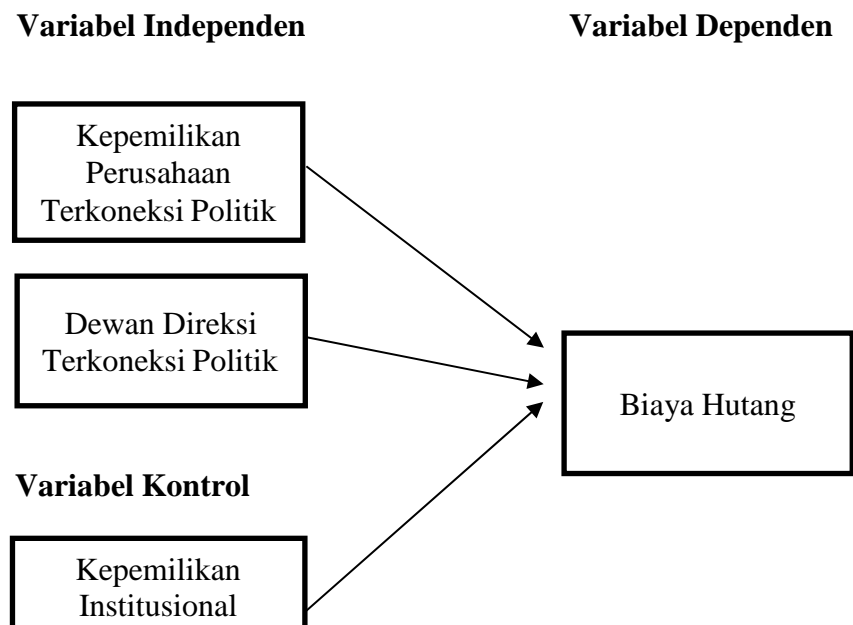
Dewan direksi merupakan organ perseroan yang berwenang dan bertanggung jawab penuh atas pengurusan perusahaan untuk kepentingan perusahaan, Perusahaan yang memiliki dewan direksi yang terkoneksi politik merupakan suatu keuntungan, karena dewan direksi dapat menjamin kontrak dengan pemerintah atau menjaga hubungan yang baik dengan pemerintah (Shin et

al., 2018). Kreditur berpikir bahwa direksi yang terkoneksi politik memainkan peran penting dalam mengelola perusahaan dengan memberikan pengalaman mereka dalam bisnis ke manajemen perusahaan. Penelitian yang menggunakan dewan direksi atau pimpinan tinggi perusahaan sebagai variabel penelitian pernah dilakukan oleh (Claessens et al., 2008; Fisman, 2001). Hasil penelitian (Bliss & Gul, 2012) menyatakan bahwa dewan direksi yang terkoneksi politik memiliki biaya hutang yang lebih besar. Hasil yang berbeda ditemukan di penelitian (Khaw et al., 2019) yang menyatakan bahwa dewan direksi yang terkoneksi politik memiliki biaya hutang yang rendah. Berdasarkan uraian diatas, maka hipotesis kedua yang diajukan pada penelitian ini adalah:

H₂: Dewan direksi terkoneksi politik berpengaruh negatif terhadap biaya hutang.

2.4 Kerangka Pemikiran

Berdasarkan hipotesis yang telah dijelaskan, maka peneliti membuat kerangka pemikiran yang digambarkan sebagai berikut:



Gambar 2.1. Kerangka Pemikiran

III. METODE PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian dan Gambaran dari Populasi (Objek) Penelitian

Pendekatan penelitian yang dilakukan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan metode penelitian kuantitatif. Peneliti memilih metode penelitian kuantitatif untuk dapat diketahui hubungan yang signifikan antar variabel yang diteliti sehingga menghasilkan kesimpulan yang akan memperjelas gambaran mengenai objek yang diteliti. Pendekatan ini berupa rumusan masalah yang bertujuan untuk mengetahui hubungan sebab akibat antara dua variabel atau lebih. Penelitian ini menjelaskan tentang pengaruh koneksi politik. Jumlah populasi dalam penelitian ini sebanyak 47 perusahaan pertambangan dan objek penelitian sebanyak 39 perusahaan pertambangan yang terdaftar di BEI, sehingga pada periode penelitian tahun 2015-2019 terdapat 195 laporan keuangan pertambangan.

Dalam penelitian terdapat 15 data perusahaan yang dikeluarkan (*outlier*). data- data tersebut dieliminasi dari sampel agar tidak mengganggu kenormalan data. *Outlier* merupakan data yang memiliki karakteristik yang berbeda jauh dari observasi-observasi lainnya dan muncul dalam bentuk nilai ekstrim atau data yang menyimpang terlalu jauh dari data yang lainnya dalam suatu rangkaian data sehingga adanya data *outlier* ini akan membuat analisis terhadap serangkaian data

menjadi bias, atau tidak mencerminkan fenomena yang sebenarnya. *Outlier* dilakukan peneliti karena adanya populasi yang diambil sebagai sampel, tetapi distribusi dari variabel dalam populasi tersebut memiliki nilai ekstrim dan tidak terdistribusi secara normal. Seperti peneliti melakukan *outlier* terhadap perusahaan PT Indo Tambangraya Megah Tbk dan PT Resource Alam Indonesia Tbk. Perusahaan-perusahaan tersebut memiliki biaya hutang yang sangat kecil apabila dibandingkan dengan perusahaan lainnya. Hal ini dikarenakan data biaya hutang perusahaan tersebut menyimpang terlalu jauh dari data yang lainnya dalam suatu rangkaian data sehingga diperlukan bagi peneliti untuk melakukan *outlier*. Proses pengambilan sampel dijelaskan pada tabel 3.1 sebagai berikut:

Tabel 3.1. Kriteria Penentuan Sampel

No	Keterangan	Jumlah Perusahaan
1	Perusahaan Pertambangan yang terdaftar di BEI tahun 2019	47
2	Perusahaan yang tidak menyediakan data laporan keuangan secara lengkap dari tahun 2015-2019	(8)
3	Jumlah sampel	39
4	Tahun yang akan diuji (2015 - 2019)	5
5	<i>Outlier</i>	(15)
6	Jumlah data	180

Sumber : Data Olahan SPSS 25

3.2 Teknik Pengambilan Sampel

Teknik pengambilan sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah *purposive sampling* dengan kriteria sampel sebagai berikut:

1. Perusahaan pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia yang secara konsisten melaporkan laporan keuangan tahunan pada tahun 2015 sampai dengan tahun 2019.
2. Perusahaan pertambangan mempunyai keseluruhan data yang diperlukan oleh peneliti dalam hal hubungannya dengan variabel- variabel terkait dengan penelitian ini.

3.3 Teknik Pengumpulan Data

Penelitian ini menggunakan data sekunder yaitu berupa laporan keuangan dan laporan tahunan perusahaan. Data penelitian ini diperoleh melalui sumber yang ada di Perusahaan Pertambangan yang telah terdaftar di BEI selama periode 2015-2019, kemudian peneliti memilih data dan mengumpulkan data-data yang sesuai dengan kriteria atau kebutuhan penelitian.

3.4 Definisi Operasional dan Pengukuran Variabel

Dalam penelitian ini terdapat variabel dependen, variabel independen dan variabel kontrol. Variabel dependen adalah variabel yang tidak bebas atau terikat yang mempengaruhi variabel bebas. Variabel dependen dalam penelitian ini adalah biaya hutang. Variabel independen yaitu variabel terjadi karena perubahan

dan menimbulkan variabel terikat (variabel dependen). Dalam penelitian ini menggunakan variabel independen yaitu kepemilikan perusahaan terkoneksi politik dan dewan direksi terkoneksi politik. Variabel kontrol merupakan variabel yang dapat dikendalikan sehingga pengaruh variabel independen terhadap dependen tidak dipengaruhi oleh faktor luar yang tidak diteliti. Dalam penelitian ini menggunakan variabel kontrol yaitu kepemilikan institusional.

3.4.1 Biaya Hutang

Menurut (Fabozzi, 2008) perhitungan biaya hutang dilihat dari besarnya beban bunga yang harus dibayarkan oleh perusahaan dalam periode tertentu dibagikan dengan rata-rata antara jumlah pinjaman baik jangka pendek maupun jangka panjang yang menghasilkan bunga selama periode tersebut. Biaya bunga dapat dilihat di laporan laba rugi perusahaan, dan hutang jangka pendek maupun hutang jangka panjang perusahaan dapat dilihat di laporan posisi keuangan. Secara sistematis, dapat dirumuskan sebagai berikut:

$$Cost\ Of\ Debt = \frac{\text{Biaya bunga tahunan}}{\text{Rata – rata hutang jangka panjang dan pendek}}$$

3.4.2 Kepemilikan Perusahaan Terkoneksi politik

Menurut (Faccio et al., 2006) kepemilikan perusahaan dikatakan memiliki hubungan politik apabila paling tidak salah satu dari pimpinan perusahaan, pemegang saham atau kerabat mereka pernah atau sedang menjabat sebagai pejabat tinggi negara, anggota parlemen, atau pengurus partai yang menjadi

perwakilan di parlemen. Kepemilikan perusahaan terkoneksi politik membuat perusahaan mendapatkan perlakuan khusus, seperti kemudahan dalam mendapatkan pinjaman modal. Variabel ini diukur dengan skala dummy dengan pengukuran ada atau tidaknya kepemilikan saham oleh pemerintah sedikitnya 20% di dalam perusahaan, sehingga jika perusahaan diketahui memiliki hubungan politik maka akan diberi nilai 1, lalu jika perusahaan tidak memiliki hubungan politik maka diberi nilai 0 (Faccio et al., 2006).

3.4.3 Dewan Direksi Terkoneksi Politik

Dewan direksi memiliki tanggung jawab yaitu dewan direksi harus bertanggung jawab penuh atas pengurusan perusahaan untuk kepentingan dan tujuan perusahaan. (Bliss & Gul, 2012) mengartikan koneksi politik sebagai sebuah hubungan yang dekat diantara pejabat tinggi perusahaan atau mengontrol *shareholders* dengan individu yang memiliki koneksi politik. Dewan direksi yang terkoneksi politik pada penelitian ini menggunakan pengukuran variabel *dummy*. Variabel *dummy* diukur dengan menggunakan kode. Kode 1 jika perusahaan dengan adanya minimal 1 dewan direksi yang terkoneksi politik atau lebih dan kode 0 untuk perusahaan dengan adanya dewan direksi terkoneksi politik kurang dari 1 (Faccio et al., 2006) .

3.4.4 Kepemilikan Institusional Sebagai Variabel Kontrol

Kepemilikan institusional pada penelitian ini merupakan variabel kontrol. Biaya hutang tidak hanya dipengaruhi oleh koneksi politik, ada banyak faktor lain yang mempengaruhi pula. Faktor-faktor seperti perusahaan yang memiliki kepemilikan institusional lebih besar bisa saja akan mempengaruhi biaya hutang perusahaan. Oleh karena itu, agar tidak mempengaruhi variabel terikat, faktor seperti ini harus dikontrol secara ketat dan dijadikan variabel kontrol dalam penelitian. Kepemilikan institusional merupakan proporsi kepemilikan saham yang dimiliki institusional pada akhir tahun yang diukur dalam persentase saham yang dimiliki oleh investor institusional dalam suatu perusahaan (Dian & Lidyah, 2014). Pemegang saham institusi biasanya merupakan institusi keuangan seperti perusahaan asuransi, bank, dana pensiun, investment banking, maupun institusi lainnya (Lamora & Starga, 2013). Variabel kepemilikan institusional diukur dengan persentase kepemilikan institusi dalam struktur saham perusahaan (Lamora & Starga, 2013).

$$INST = \frac{\text{Jumlah saham institusi}}{\text{Total saham}}$$

3.5 Teknik Analisis Data

3.5.1 Statistik Deskriptif

Menurut (Ghozali, 2016) statistik deskriptif memberikan gambaran atau deskripsi suatu data yang dapat terlihat dari nilai rata – rata (*mean*), standar deviasi, varian, maksimum, minimum, *sum*, *range*, kurtosis dan *skewness* (kemencengan distribusi). Dengan demikian yang termasuk dalam statistik deskriptif antara lain adalah penyajian data melalui tabel, grafik, diagram lingkaran, perhitungan nilai rata-rata (*mean*), nilai maksimum, nilai minimum, dan standar deviasi.

3.5.2 Uji Asumsi Klasik

Uji asumsi klasik dilakukan untuk menilai apakah di dalam sebuah model regresi linier terdapat masalah-masalah asumsi klasik. Untuk memperoleh hasil pengujian yang baik maka semua data yang dibutuhkan dalam penelitian harus diuji terlebih dahulu agar tidak melanggar asumsi klasik yang ada, dapat memperoleh hasil pengujian hipotesis yang tepat dan dapat dipertanggung jawabkan serta menghasilkan model regresi yang signifikan dan representatif (Ngadiman & Puspitasari, 2017). Menurut Ghozali (2013), pengujian asumsi klasik meliputi uji normalitas, uji multikolinearitas, uji autokorelasi, dan uji heteroskedastisitas. Dalam penelitian ini dilakukan uji asumsi klasik yang meliputi uji normalitas, uji autokorelasi, uji multikolinearitas, dan uji heteroskedastisitas

3.5.2.1 Uji Normalitas

Uji normalitas dilakukan untuk menilai sebaran data pada sebuah kelompok data atau variabel, apakah sebaran data tersebut berdistribusi normal atau tidak. Uji ini berguna untuk menentukan data yang telah dikumpulkan berdistribusi normal atau diambil dari populasi normal

3.5.2.2 Uji Multikolonieritas

Uji Multikolonieritas bertujuan untuk menguji pada model regresi adanya korelasi antar variabel independen. Ghazali, (2013) mengatakan bahwa model regresi yang baik seharusnya tidak mengalami korelasi antar variabel independennya. Multikolonieritas ditentukan dengan melihat nilai Tolerance dan Variance Inflation Factor (VIF) yang apabila memiliki nilai Tolerance $\geq 0,10$ atau sama dengan $VIF \leq 10$ berarti model regresi tersebut terbebas dari multikolonieritas.

3.5.2.3 Uji Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas yaitu uji yang bertujuan untuk mengetahui apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan variance dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain. Ada beberapa cara untuk mendeteksi ada atau tidaknya heteroskedastisitas, salah satunya melalui grafik plot (Ghozali, 2016). Dasar analisis yaitu:

- a. Jika ada pola tertentu, seperti titik-titik yang ada membentuk pola tertentu yang teratur (bergelombang, melebar kemudian menyempit),

maka mengindikasikan telah terjadi heteroskedastisitas.

- b. Jika tidak ada pola yang jelas, serta titik-titik menyebar di atas dan dibawah angka 0 pada sumbu Y, maka tidak terjadi heteroskedastisitas.

3.5.2.4 Uji Autokorelasi

Uji autokorelasi yaitu uji yang bertujuan untuk mengetahui apakah dalam model regresi ada korelasi antara kesalahan pengganggu pada periode t-1 atau periode sebelumnya. Menurut Sunyoto (2016), salah satu ukuran dalam menentukan ada atau tidaknya masalah autokorelasi digunakan uji Durbin-Watson. Ketentuan uji Durbin-Watson dalam menentukan diterima atau tidaknya hipotesis nol adalah sebagai berikut:

1. Jika nilai DW dibawah -2 ($DW < -2$), maka terjadi autokorelasi positif.
2. Jika nilai DW berada diantara -2 dan +2 ($-2 < DW < +2$), maka tidak terjadi autokorelasi.
3. Jika nilai DW di atas +2 ($DW > +2$), maka terjadi autokorelasi negatif.

3.5.3 Pengujian Hipotesis

3.5.3.1 Analisis Regresi Berganda

Penelitian ini menggunakan persamaan regresi berganda untuk menganalisis pengaruh koneksi politik pada perusahaan pertambangan yang terdaftar di BEI tahun 2015-2019. Model persamaan regresi berganda sebagai berikut :

$$\text{COD} = \alpha + \beta_1\text{PCF} + \beta_2\text{PCD} + \beta_3\text{KEP_INST} + e$$

Keterangan :

COD = Biaya hutang

α = Konstanta (harga Y bila X=0)

β_1 - β_3 = Koefisien regresi

PCF = Variabel kepemilikan perusahaan terkoneksi politik

PCD = Variabel dewan direksi terkoneksi politik

KEP_INST = Variabel kepemilikan institusional

e = *standard error*

3.5.3.2 Uji Koefisien Determinasi (R^2)

Uji koefisien Determinasi adalah uji yang digunakan untuk pengukuran seberapa jauh kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel independen. Penilaian koefisien determinasi yaitu antara 0 dan 1. Hasil nilai *Adjusted R²* dapat naik atau turun apabila satu variabel independen ditambahkan ke

dalam model.

3.5.3.3 Uji Kelayakan Model (Uji F)

Uji kelayakan model (uji F) digunakan untuk melihat apakah model regresi yang diestimasi layak (fit) atau tidak dalam menjelaskan pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen (Ghozali, 2016). Pengujian ini dilakukan dengan menggunakan significance level 0,05 ($\alpha = 5\%$) dan kriteria pengujian hipotesis adalah sebagai berikut:

1. Apabila nilai signifikansi $F > \alpha = 5\%$, maka H_a ditolak atau H_0 diterima berarti model regresi dalam suatu penelitian tidak layak atau tidak fit untuk digunakan dalam penelitian.
2. Apabila nilai signifikansi $F < \alpha = 5\%$, maka H_a diterima atau H_0 ditolak berarti model regresi dalam suatu penelitian layak (fit) untuk digunakan dalam penelitian.

3.5.3.4 Uji Signifikansi Parameter Individual (Uji t)

Uji signifikansi parameter individual (uji t) digunakan untuk mengetahui pengaruh masing-masing variabel independen terhadap variabel dependen. Pengujian ini dilakukan dengan menggunakan significance level 0,05 ($\alpha = 5\%$) dan kriteria pengujian hipotesis adalah sebagai berikut:

1. Apabila nilai signifikansi $t > \alpha = 5\%$, maka H_a ditolak atau H_0 diterima dimana koefisien regresi tidak signifikan dan secara individual variabel independen tidak berpengaruh signifikan

terhadap variabel dependen.

2. Apabila nilai signifikansi $t < \alpha = 5\%$, maka H_a diterima atau H_0 ditolak dimana koefisien regresi signifikan dan secara individual variabel independen berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen.

V. KESIMPULAN DAN SARAN

5.1. Kesimpulan

Penelitian ini bertujuan untuk melihat pengaruh Koneksi Politik Terhadap Biaya Hutang pada Perusahaan Pertambangan yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2015-2019. Penelitian ini menggunakan analisis regresi linear berganda sebagai alat analisis hipotesis. Berdasarkan hasil pengujian hipotesis pada variabelindependen Kepemilikan Perusahaan Terkoneksi Politik dan Dewan Direksi Terkoneksi Politik dengan variabel kontrol Kepemilikan Institusional dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Kepemilikan Perusahaan Terkoneksi Politik berpengaruh negatif signifikan terhadap Biaya Hutang pada Perusahaan Pertambangan yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2015-2019. Hal ini dibuktikan melalui pengujian signifikansi dimana nilai signifikansi diperoleh sebesar 0,01 atau lebih kecil dari 0,05 yang menunjukkan bahwa hipotesis dalam penelitian ini terdukung.
2. Dewan Direksi Terkoneksi Politik berpengaruh negatif signifikan terhadap Biaya Hutang pada Perusahaan Pertambangan yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2015-2019. Hal ini dibuktikan melalui

pengujian signifikansi dimana nilai signifikansi diperoleh sebesar 0,006 atau lebih kecil dari 0,05 yang menunjukkan bahwa hipotesis dalam penelitian ini terdukung.

5.2 Keterbatasan Penelitian

Keterbatasan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Penelitian ini hanya menggunakan dua variabel independen, yaitu Kepemilikan Perusahaan Terkoneksi Politik dan Dewan Direksi Terkoneksi Politik serta Kepemilikan Institusional sebagai variabel kontrol dimana kemampuannya masih sangat terbatas dalam menjelaskan variabel dependen dipengaruhi oleh faktor-faktor lain yang tidak digunakan dalam model penelitian ini, seperti rasio leverage, cash-flow, ukuran perusahaan, *growth*, *current ratio*, *Return of Asset*, *CEO Duality*, *Board Size*, Total Anggota Dewan Direksi, Umur Perusahaan dan sebagainya.
2. Terbatasnya informasi oleh peneliti dalam melihat informasi kepemilikan perusahaan yang terkoneksi politik dan dewan direksi terkoneksi politik. Peneliti hanya mendapatkan informasi melalui pencarian internet (*google*) dan informasi di laporan tahunan perusahaan.
3. Keterbatasan informasi oleh peneliti untuk mengetahui apakah kreditur ikut memperhatikan faktor 5C (*Character, Capacity, Capital, Condition, Collateral*) atau tidak, terlepas perusahaan atau dewan direksi perusahaan tersebut terkoneksi politik.

4. Sampel penelitian yang digunakan terbatas, yaitu hanya perusahaan Pertambangan periode 2015-2019 yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia.
5. Periode penelitian yang digunakan masih relatif singkat, yaitu periode 2015- 2019.

5.3 Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, saran yang diberikan oleh peneliti untuk penelitian selanjutnya adalah sebagai berikut:

1. Bagi investor dan kreditur sebaiknya dapat lebih cermat dalam pengambilan keputusan investasi, seperti memperhatikan apa saja faktor-faktor yang dapat mempengaruhi biaya hutang dalam perusahaan. Diharapkan hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan agar dapat berhati-hati dalam pengambilan keputusan investasi, karena dengan adanya koneksi politik dapat membuat perusahaan bergantung kepada pemerintah sehingga perusahaan tidak dapat menerapkan prinsip berkesinambungan usaha dengan baik dan menghilangkan kemampuan dan kompetensi dalam melakukan bersaing di pasar saham.
2. Bagi regulator atau pemerintah diharapkan dapat lebih memperhatikan perusahaan dan membuat regulasi yang tegas mengenai keterlibatan politik di perusahaan agar tidak melakukan penyimpangan di perusahaan sehingga merugikan investor dan merusak citra pemerintah.

3. Bagi penelitian selanjutnya diharapkan dapat menambah faktor-faktor atau variabel independen lain yang dapat mempengaruhi biaya hutang, seperti proporsi komisaris independen, kepemilikan manajerial, kepemilikan keluarga, kualitas audit, dan sebagainya, sehingga faktor-faktor atau variabel independen lain tersebut dapat memberikan kontribusi penelitian secara lebih menyeluruh.
4. Bagi penelitian selanjutnya diharapkan dapat memperluas sampel penelitian, selain perusahaan pertambangan sehingga hasil penelitian yang diperoleh dapat digeneralisasi.
5. Bagi penelitian selanjutnya diharapkan dapat menambah periode penelitian yang relatif panjang dan menggunakan proksi lain untuk mengukur biayahutang sehingga dapat dibandingkan secara lebih jelas.

DAFTAR PUSTAKA

- Amelia, H. (2013). Analisis pengaruh hubungan politik dan kepemilikan keluarga terhadap biaya utang dan biaya ekuitas: studi empiris pada perusahaan manufaktur yang terdaftar pada BEI= *Analysis of political connection and family ownership effect on cost of debt and cost of equity: empirical study on manufacturing firms listed in Indonesia Stock Exchange*.
- Ashkhabi, I. R., & Agustina, L. (2015). Pengaruh *Corporate Governance*, Struktur Kepemilikan perusahaan dan Ukuran Perusahaan terhadap Biaya Utang. *Accounting Analysis Journal*, 4(3).
- Atwood, et al. (2017). *Financial Supports for Coal and Renewables in Indonesia. GSI Report, May*, 1–6.
- Bliss, M. A., & Gul, F. A. (2012). *Political connection and cost of debt: Some Malaysian evidence. Journal of Banking and Finance*, 36(5), 1520–1527.
- Boubakri, N., Cosset, J., & Saffar, W. (2012). *The Impact Of Political Connections On Firms's Operating Performance And Financing Decisions. Journal of Financial Research*, 35(3), 397–423.
- Butje, S., & Tjondro, E. (2014). Pengaruh Karakter Eksekutif dan Koneksi Politik Terhadap *Tax Avoidance. Tax & Accounting Review*, 4(2).
- Claessens, S., Feijen, E., & Laeven, L. (2008). *Political connections and preferential access to finance: The role of campaign contributions. Journal of Financial Economics*, 88(3), 554–580.
- Dian, F., & Lidyah, R. (2014). Pengaruh corporate social responsibility, kepemilikan manajerial dan kepemilikan institusi terhadap nilai perusahaan tambang batu bara yang terdaftar di BEI.
- Fabozzi, F. J. (2008). *Bond Markets, Analysis and Strategies''(Int'l Edition)–6th Edition*. Prentice Hall.

- Faccio, M., Masulis, R. W., & McConnell, J. J. (2006). *Political connections and corporate bailouts*. *The Journal of Finance*, 61(6), 2597–2635.
- Fisman, R. (2001). *Estimating the value of political connections*. *American Economic Review*, 91(4), 1095–1102.
- Furi, R. A. (2019). Pengaruh Tax Avoidance, Karakteristik Perusahaan, Struktur Kepemilikan Keluarga, Koneksi Politik Terhadap Biaya Hutang Pada Perusahaan Manufaktur Terdaftar Di BEI Periode 2016–2018.
- Ghozali, I. (2014). *Ekonometrika: Teori, konsep dan aplikasi dengan IBM SPSS 22*. Semarang: Badan Penerbit Undip.
- Ghozali, I. (2016). *Aplikasi Analisis Multivariete IBM SPSS 23*, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang. 2016. *Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program IBM SPSS, 23*.
- Greenpeace. (2019). *Elite Politik dalam Pusaran Bisnis Batu bara Daftar GambarDaftar Kotak*.
- Ha, N. T. Le, & Bao, H. C. G. (2020). *Cost of Debt and Political Connection of Firms in Vietnam*. *International Journal of Sciences: Basic and Applied Research (IJSBAR)*, 4531, 15–23.
- Harjan, S. A., Teng, M., Shah, S. S. H., & Mohammed, J. H. (2019). *Political Connections and Cost of Debt Financing: Empirical Evidence from China*. *International Journal of Economics and Financial Issues*, 9(1), 212.
- Harymawan, I., Agustia, D., & Agung, A. K. (2017). *Characteristics of politically connected firms in Indonesia*. *Problems and Perspectives in Management*, 15(4), 17–23.
- Ifada, & Muhimatul, L. (2017). Faktor-Faktor yang Berpengaruh Terhadap Kebijakan Hutang Perusahaan. *Jurnal Akuntansi Dan Auditing*, 14(1), 40–54.
- Jensen, M. C., & Meckling, W. H. (1976). *Theory of the firm: Managerial behavior, agency costs and ownership structure*. *Journal of Financial Economics*, 3(4), 305–360.
- Khaw, K. L. H., Zainudin, R., & Rashid, R. M. (2019). *Cost of debt financing: Does political connection matter?* *Emerging Markets Review*, 41(August), 100632.

- Lamora, P., & Starga, V. (2013). Kamaliah,“. Pengaruh Kepemilikan Manajerial, Kepemilikan Institusional dan Kepemilikan Keluarga terhadap Manajemen Laba (Earning Management) pada Perusahaan Berkepemilikan Ultimat yang Terdaftar di BEI.
- Masri, I., & Martani, D. (2014). *Tax avoidance behaviour towards the cost of debt. International Journal of Trade and Global Markets*, 7(3), 235–249.
- Meiriasari, V. (2017a). Pengaruh *Corporate Governance*, Kepemilikan Keluarga, Kepemilikan Institusional Dan Ukuran Perusahaan (Firm Size) Terhadap Biaya Utang. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Global Masa Kini*, 8(1), 28–34.
- Ngadiman, N., & Puspitasari, C. (2017). Pengaruh *Leverage*, Kepemilikan Institusional, Dan Ukuran Perusahaan Terhadap Penghindaran Pajak (Tax Avoidance) Pada Perusahaan Sektor Manufaktur Yang Terdaftar Di BursaEfek Indonesia 2010-2012. *Jurnal Akuntansi*, 18(3), 408–421.
- Novianti, A. R. (2014). Pengaruh Penghindaran Pajak Terhadap Biaya Hutang : Studi Kasus pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada Tahun 2010-2012. Universitas Pendidikan Indonesia.
- Nuraina, E. (2010). Pengaruh kepemilikan institusional dan ukuran perusahaan terhadap kebijakan hutang dan nilai perusahaan (*Studi Pada Perusahaan Manufaktur yang Tercatat di BEI*). UNS (Sebelas Maret University).
- P Saragih, H., & Sidik, S. (2019). *Saham APLN Meroket 31%, Benarkah CentralPark & Sency Dijual? Www.Cnbcindonesia.Com*.
- Perdana, I. B. P., & Kusumastuti, R. (2011). *Analysis of the impacts of family ownership on a company's costs of debt. International Journal of Administrative Science & Organization*, 18(2), 143–151.
- Purwanti, S. M., & Sugiyarti, L. (2017). Pengaruh Intensitas Aset Tetap, Pertumbuhan Penjualan Dan Koneksi Politik Terhadap *Tax Avoidance* (Studi Kasus pada Perusahaan Manufaktur Terdaftar Di BEI Periode 2012–2016). *Jurnal Riset Akuntansi Dan Keuangan*, 5(3), 1625–1642.
- Rebecca, Y., & Siregar, S. V. (2012). Pengaruh *Corporate Governance Index*, Kepemilikan Keluarga, dan Kepemilikan Institusional terhadap Biaya Ekuitas dan Biaya Utang (Studi Empiris pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di BEI). *Skripsi Akuntansi, Universitas Indonesia. Jakarta, September*, 1–28.

- Sadjiarto, A., Mustofa, D. A., Putra, W. A., & Winston, W. (2019). Pengaruh *Tax Avoidance* terhadap *Cost of Debt* untuk Emiten BEI Tahun 2014-2017. *Assets: Jurnal Akuntansi Dan Pendidikan*, 8(1), 57–69.
- Santosa, J. E., & Kurniawan, H. (2017). Analisis Pengaruh Tax Avoidance Terhadap Cost of Debt Pada Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar Di BeI Selama Periode 2010–2014.
- Shin, J. Y., Hyun, J., Oh, S., & Yang, H. (2018). *The effects of politically connected outside directors on firm performance: Evidence from Korean chaebol firms. Corporate Governance: An International Review*, 26(1), 23–44.
- Sunyoto, D. (2013). Analisis laporan keuangan untuk bisnis. *Yogyakarta: CAPS*.
- Sutarti, D. T., Andini, R., & Pranaditya, A. (2018). Pengaruh tata kelola perusahaan dan penghindaran pajak pada biaya hutang dengan kepemilikan institusional sebagai variabel moderasi (Studi Kasus Pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar Di BEI Penelitian Tahun 2012-2016). *Journal OfAccounting*, 4(4).
- Swissia, P., & Purba, B. (2018). Pengaruh Struktur Kepemilikan Institusional, Kepemilikan Manajerial, Kepemilikan Keluarga, Pengungkapan Sukarela Dan *Leverage* Terhadap Biaya Utang. *Jurnal Akuntansi Dan Keuangan*, 9(2),42–65.
- Syahwier, C. A., & Fitriani, S. A. (2018). *Effect of Tax Avoidance, Size of the Company, Leverage, Age of the Company on Cost of Debt in Manufacturing Companies Listed. 1st Economics and Business International Conference 2017 (EBIC 2017)*.
- Tee, C. M. (2019). *Political connections, the cost of debt and board attributes: evidence from Malaysia. Managerial Finance*, 45(7), 842–855.
- Tiffani, L., & Marfuah, M. (2015). Deteksi *financial statement fraud* dengan analisis *fraud triangle* pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di bursa efek Indonesia. *Jurnal Akuntansi Dan Auditing Indonesia*, 19(2), 112–125.
- Wardani, D. K., & Rumahorbo, H. D. S. (2018). Pengaruh penghindaran pajak, tata kelola dan karakteristik perusahaan terhadap biaya hutang. *Jurnal Akuntansi*, 6(2), 180–193.
- Watts, R. L., & Zimmerman, J. L. (1986). *Positive accounting theory*.

Wiranata, Y. A., & Nugrahanti, Y. W. (2013). Pengaruh struktur kepemilikan terhadap profitabilitas perusahaan manufaktur di Indonesia. *Jurnal Akuntansi Dan Keuangan*, 15(1), 15–26.